

Progres Akses Tol Tanjung Priok Baru 50%

Oleh **Eko Adityo Nugroho**

► JAKARTA – Progres pengerjaan konstruksi akses tol Pelabuhan Tanjung Priok baru mencapai 50%, padahal pengoperasian jalan bebas hambatan itu ditargetkan pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun tersebut masih terkendala pembebasan lahan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Nurhadi mengatakan, proyek tol Tanjung Priok dibagi menjadi lima seksi. Seksi tersebut adalah seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea (2,74 km), seksi E2A Jamepa-Simpang Jamepa (1,92 km), seksi NS Link Simpang Jamepa-Yos Sudaro (2,42 km), dan seksi NS Direct Ramp (1,1 km).

"Progres fisik untuk seksi E1 sudah rampung dan beroperasi tanpa tarif, sedangkan seksi E2 progres konstruksi mencapai 15,38%, seksi E2A sekitar 11,31%, dan seksi NS Link sebesar 69,17%. Rata-rata progres untuk seksi-seksi ini sekitar 50%," kata dia di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut dia, akses tol akan mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk konstruksi akses tol sepanjang 11,36 km itu mencapai Rp 3,6 triliun. Rinciannya adalah untuk konstruksi seksi E1 Rp 662,54 miliar, seksi E2 Rp 1,04 triliun, seksi E2A Rp 1,042 triliun, seksi NS Link Rp 564 miliar, dan seksi NS Direct Ramp Rp 300 miliar.

Bambang menambahkan, seksi NS Direct Ramp belum dikonstruksi karena masih dalam proses tender. Dari

hasil prakualifikasi sudah terdapat empat perusahaan yang berminat untuk mengerjakan seksi itu. Perusahaan tersebut adalah konsorsium Kobayashi dan PT Jakarta Propertindo, konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) dan PT Hutama Karya, konsorsium Tobashima dan PT Wijaya Karya, serta konsorsium Taisei dan PT Pembangunan Perumahan.

"Penentuan pemenang ini diharapkan tuntas pada kuartal III-2013 dan langsung dilakukan *groundbreaking*. Proyek seksi NS Direct Ramp diharapkan bisa beroperasi pada 2015," tambah Bambang.

Pembangunan ruas tol seksi E2 juga terkendala pembebasan lahan. Pada seksi E2 luas tanah yang sudah dibebaskan baru mencapai 91.095 meter persegi (m^2) atau 94% dari kebutuhan 96.936 m^2 . Sisa lahan yang terdiri atas 34 bidang yang belum bebas akan diselesaikan melalui konsinyasi.

Sementara itu, progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 m^2 atau sekitar 70% dari total lahan yang dibutuhkan 75.226 m^2 . Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi itu, di antaranya termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.

Bambang menuturkan, tanah yang sudah bebas untuk seksi NS Link seluas 5.237 m^2 atau 38% dari 13.782 m^2 . Sedangkan sisanya ada sebagian bidang tanah milik warga yang menun-

tut harga ganti rugi hingga Rp 35 juta per m^2 , sedangkan harga *appraisal* hanya Rp 12 juta per m^2 .

"Ada dua oknum yang mengumpulkan berkas tanah warga untuk meminta tuntutan itu. Tetapi setelah diberi penjelasan ada beberapa warga yang akhirnya bersedia menerima ganti rugi yang ditawarkan," papar dia.

Pada seksi NS Direct Ramp, tanah yang sudah bebas seluas 3.304 m^2 atau 81% dari 4.064 m^2 . Pengerjaan proyek ini juga terkendala oleh pemindahan utilitas milik PLN, Pintu Air Koja, Tugu Pelindo II, dan Masjid At-Tauhid. "Namun, kami optimistis ini bisa selesai tepat waktu," ujar Bambang.

Mendesak

Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ke Pelabuhan Tanjung Priok guna mengurai kemacetan di wilayah tersebut dan menekan biaya logistik.

"Kemacetan menuju dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa ditoleransi," kata dia baru-baru ini.

Dia mengakui proses pembebasan lahan menjadi kendala dalam menyelesaikan infrastruktur itu. Namun, jika masalah pembebasan lahan cepat tuntas, pembangunan jalan tol itu bisa rampung dalam waktu kurang dari dua tahun.

Pelabuhan Tanjung Priok juga dinilai sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, saat ini pelabuhan itu melayani 22,6% ekspor dan 66,36% impor Indonesia.

"Sebagai pelabuhan utama, pengembangan infrastruktur di Tanjung Priok akan sangat menentukan perekonomian nasional. Investor asing pun pasti akan berhitung ulang untuk menanamkan investasinya jika melihat kondisi infrastruktur yang sangat tidak layak ini," papar Siswanto.